

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Tindak pidana perkosaan sering sekali menjumpai kesulitan dalam proses pembuktiannya, berupa kurangnya alat bukti keterangan saksi. Saksi mahkota muncul sebagai sebuah solusi untuk memudahkan dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan dengan penyertaan. Penggunaan saksi mahkota ini bertentangan dengan hak-hak asasi dari terdakwa yang telah diatur dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai instrumen hukum internasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perkosaan serta mengetahui kedudukan saksi mahkota ditinjau dari hak-hak terdakwa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif. Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa saksi mahkota membantu dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Seterusnya di sisi lain, penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi dari terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP dan ICCPR sehingga perlu untuk ditinjau kembali penggunaannya.

Kata kunci: *Saksi mahkota; tindak pidana perkosaan; hak terdakwa*